



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 35 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa terkait Dana Desa di Kabupaten Tulungagung sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menjadi pandemik global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa sehingga Pemerintah Pusat menerbitkan beberapa regulasi berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 10/PRI.00/IV/2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020;

v A/s

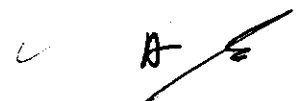
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor Nomor 54 tahun 2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1448), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupatenn Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 89), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 92);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**




## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

✓ 

13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.
18. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
21. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa.
24. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

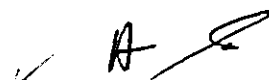
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional;
  - (2) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami penurunan sebesar Rp. 10.807.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) setiap desa sehingga ditetapkan Alokasi Dasar sebesar Rp 651.999.000 (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang secara rinci tertuang dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan tambahan ketentuan:
  - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing masing:
    1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
    2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua.
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
- (2) Dalam hal Dana Desa tahap I telah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
  - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.



- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
    - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama; dan
    - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua.
  2. Dana Desa tahap II diprioritaskan BLT-Dana Desa.
- (3) Dalam hal Dana Desa tahap II telah disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT-Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT-Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
  - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
    - a. peningkatan kualitas hidup;
    - b. peningkatan kesejahteraan;
    - c. penanggulangan kemiskinan; dan
    - d. peningkatan pelayanan publik.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;
    3. energi;
    4. informasi dan komunikasi; dan
    5. sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
    1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
    3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
    2. penanganan bencana alam dan nonalam, dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
    1. konflik sosial; dan
    2. bencana sosial.
- (2) Pengembangan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 merupakan kegiatan yang mendukung program Sistem Informasi Desa dalam pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi Komunikasi dan informasi lokal Desa meliputi:
- a. honor/insentif operator desa;
  - b. *website* desa;
  - c. *domain hosting*;
  - d. *server*;
  - e. *wifi* desa; dan
  - f. lain-lain yang terkait dengan program Sistem Informasi Desa.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.



6. Diantara Pasal 26 dan 27 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
  - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. pandemi flu burung;
  - c. wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
  - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum/tidak terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 26B

- (1) Bupati mendelegasikan pengesahan Dokumen Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2020 kepada Camat.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah data diterima dari Desa.
- (3) Dokumen yang telah disahkan oleh Camat ditindaklanjuti oleh Desa dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Tanggungjawab pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa yaitu Kepala Desa.

7. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.



8. Ketentuan Pasal 40 ditambah huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1);
- b. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 2 dan Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 2;
- c. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan
- d. format Laporan Pelaksanaan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) huruf b dan c, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 1f

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI TULUNGAGUNG, *P*

  
MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 21 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 35

*A*

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 35 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 21 APRIL 2020

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2020

| NO                     | KECAMATAN/<br>DESA | PAGU DD<br>SEMULA (Rp) | TURUN<br>(Rp) | PAGU DD<br>MENJADI (Rp) |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| 1                      | 2                  | 3                      | 4             | 5                       |
| <b>KEC. BOYOLANGU</b>  |                    |                        |               |                         |
| 001                    | Wajak Kidul        | 827.846.000            | 10.807.000    | 817,039,000             |
| 002                    | Sanggrahan         | 807.286.000            | 10.807.000    | 796,479,000             |
| 003                    | Pucungkidul        | 887.144.000            | 10.807.000    | 876,337,000             |
| 004                    | Boyolangu          | 832.200.000            | 10.807.000    | 821,393,000             |
| 005                    | Ngranti            | 810.820.000            | 10.807.000    | 800,013,000             |
| 006                    | Kendalbulur        | 840.397.000            | 10.807.000    | 829,590,000             |
| 007                    | Bono               | 1.024.227.000          | 10.807.000    | 1,013,420,000           |
| 008                    | Waung              | 896.119.000            | 10.807.000    | 885,312,000             |
| 009                    | Moyoketen          | 784.068.000            | 10.807.000    | 773,261,000             |
| 010                    | Wajak Lor          | 851.412.000            | 10.807.000    | 840,605,000             |
| 011                    | Karangrejo         | 875.568.000            | 10.807.000    | 864,761,000             |
| 012                    | Kepuh              | 867.620.000            | 10.807.000    | 856,813,000             |
| 013                    | Tanjungsari        | 786.290.000            | 10.807.000    | 775,483,000             |
| 014                    | Serut              | 881.158.000            | 10.807.000    | 870,351,000             |
| 015                    | Beji               | 801.400.000            | 10.807.000    | 790,593,000             |
| 016                    | Sobontoro          | 943.028.000            | 10.807.000    | 932,221,000             |
| 017                    | Gedangsewu         | 981.144.000            | 10.807.000    | 970,337,000             |
| <b>KEC. KEDUNGWARU</b> |                    |                        |               |                         |
| 018                    | Plosokandang       | 969.051.000            | 10.807.000    | 958,244,000             |
| 019                    | Tunggulsari        | 921.003.000            | 10.807.000    | 910,196,000             |
| 020                    | Ringinpitu         | 931.577.000            | 10.807.000    | 920,770,000             |
| 021                    | Loderesan          | 939.171.000            | 10.807.000    | 928,364,000             |
| 022                    | Bulusari           | 875.281.000            | 10.807.000    | 864,474,000             |
| 023                    | Bangoan            | 925.657.000            | 10.807.000    | 914,850,000             |
| 024                    | Boro               | 982.899.000            | 10.807.000    | 972,092,000             |
| 025                    | Tapan              | 791.301.000            | 10.807.000    | 780,494,000             |
| 026                    | Rejoagung          | 881.510.000            | 10.807.000    | 870,703,000             |
| 027                    | Kedungwaru         | 908.676.000            | 10.807.000    | 897,869,000             |
| 028                    | Plandaan           | 717.758.000            | 10.807.000    | 706,951,000             |
| 029                    | Ketanon            | 1.029.956.000          | 10.807.000    | 1,019,149,000           |
| 030                    | Tawang Sari        | 908.964.000            | 10.807.000    | 898,157,000             |
| 031                    | Mangunsari         | 817.688.000            | 10.807.000    | 806,881,000             |
| 032                    | Winong             | 773.269.000            | 10.807.000    | 762,462,000             |
| 033                    | Majan              | 1.088.337.000          | 10.807.000    | 1,077,530,000           |
| 034                    | Simo               | 802.409.000            | 10.807.000    | 791,602,000             |
| 035                    | Gendingan          | 799.608.000            | 10.807.000    | 788,801,000             |
| 036                    | Ngujang            | 764.745.000            | 10.807.000    | 753,938,000             |

*[Handwritten signature]*

| 1                     | 2               | 3             | 4          | 5             |
|-----------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| <b>KEC. NGANTRU</b>   |                 |               |            |               |
| 037                   | Pakel           | 853.972.000   | 10.807.000 | 843,165,000   |
| 038                   | Pucunglor       | 871.709.000   | 10.807.000 | 860,902,000   |
| 030                   | Srikaton        | 1.111.637.000 | 10.807.000 | 1,100,830,000 |
| 040                   | Padangan        | 982.053.000   | 10.807.000 | 971,246,000   |
| 041                   | Banjarsari      | 879.599.000   | 10.807.000 | 868,792,000   |
| 042                   | Pulerejo        | 769.264.000   | 10.807.000 | 758,457,000   |
| 043                   | Bendosari       | 836.384.000   | 10.807.000 | 825,577,000   |
| 044                   | Ngantru         | 934.653.000   | 10.807.000 | 923,846,000   |
| 045                   | Mojoagung       | 858.306.000   | 10.807.000 | 847,499,000   |
| 046                   | Batokan         | 867.094.000   | 10.807.000 | 856,287,000   |
| 047                   | Kepuhrejo       | 858.485.000   | 10.807.000 | 847,678,000   |
| 048                   | Pojok           | 964.911.000   | 10.807.000 | 954,104,000   |
| 049                   | Pinggirsari     | 790.864.000   | 10.807.000 | 780,057,000   |
| <b>KEC. KAUMAN</b>    |                 |               |            |               |
| 050                   | Bolarejo        | 871.831.000   | 10.807.000 | 861,024,000   |
| 051                   | Kauman          | 783.800.000   | 10.807.000 | 772,993,000   |
| 052                   | Balerejo        | 924.294.000   | 10.807.000 | 913,487,000   |
| 053                   | Batangsaren     | 913.046.000   | 10.807.000 | 902,239,000   |
| 054                   | Panggungrejo    | 814.333.000   | 10.807.000 | 803,526,000   |
| 055                   | Kalangbret      | 765.652.000   | 10.807.000 | 754,845,000   |
| 056                   | Sidorejo        | 851.094.000   | 10.807.000 | 840,287,000   |
| 057                   | Mojosari        | 902.671.000   | 10.807.000 | 891,864,000   |
| 058                   | Karanganom      | 908.157.000   | 10.807.000 | 897,350,000   |
| 059                   | Pucangan        | 1.050.891.000 | 10.807.000 | 1,040,084,000 |
| 060                   | Kates           | 1.143.380.000 | 10.807.000 | 1,132,573,000 |
| 061                   | Banaran         | 832.595.000   | 10.807.000 | 821,788,000   |
| 062                   | Jatimulyo       | 910.440.000   | 10.807.000 | 899,633,000   |
| <b>KEC. PAGERWOJO</b> |                 |               |            |               |
| 063                   | Wonorejo        | 1.323.413.000 | 10.807.000 | 1,312,606,000 |
| 064                   | Kedungcangkring | 968.691.000   | 10.807.000 | 957,884,000   |
| 065                   | Mulyosari       | 1.273.670.000 | 10.807.000 | 1,262,863,000 |
| 066                   | Segawe          | 943.450.000   | 10.807.000 | 932,643,000   |
| 067                   | Samar           | 1.260.106.000 | 10.807.000 | 1,249,299,000 |
| 068                   | Penjor          | 1.088.672.000 | 10.807.000 | 1,077,865,000 |
| 069                   | Pagerwojo       | 794.681.000   | 10.807.000 | 783,874,000   |
| 070                   | Kradinan        | 1.249.920.000 | 10.807.000 | 1,239,113,000 |
| 071                   | Sidomulyo       | 1.051.607.000 | 10.807.000 | 1,040,800,000 |
| 072                   | Gondanggunung   | 1.239.794.000 | 10.807.000 | 1,228,987,000 |
| 073                   | Gambiran        | 1.048.997.000 | 10.807.000 | 1,038,190,000 |
| <b>KEC. SENDANG</b>   |                 |               |            |               |
| 074                   | Kedoyo          | 1.659.357.000 | 10.807.000 | 1,648,550,000 |
| 075                   | Nglutung        | 1.136.733.000 | 10.807.000 | 1,125,926,000 |
| 076                   | Talang          | 1.184.471.000 | 10.807.000 | 1,173,664,000 |
| 078                   | Krosok          | 974.744.000   | 10.807.000 | 963,937,000   |

A

| 1                        | 2            | 3             | 4          | 5             |
|--------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 077                      | Dono         | 1.048.644.000 | 10.807.000 | 1,037,837,000 |
| 079                      | Tugu         | 1.135.126.000 | 10.807.000 | 1,124,319,000 |
| 080                      | Picisan      | 1.159.493.000 | 10.807.000 | 1,148,686,000 |
| 081                      | Nyawangan    | 1.654.582.000 | 10.807.000 | 1,643,775,000 |
| 082                      | Sendang      | 950.814.000   | 10.807.000 | 940,007,000   |
| 083                      | Nglurup      | 1.447.874.000 | 10.807.000 | 1,437,067,000 |
| 084                      | Geger        | 1.455.583.000 | 10.807.000 | 1,444,776,000 |
| <b>KEC. KARANGREJO</b>   |              |               |            |               |
| 085                      | Bungur       | 1.359.584.000 | 10.807.000 | 1,348,777,000 |
| 086                      | Babadan      | 1.012.815.000 | 10.807.000 | 1,002,008,000 |
| 087                      | Sukowiyono   | 839.231.000   | 10.807.000 | 828,424,000   |
| 088                      | Sembon       | 768.829.000   | 10.807.000 | 758,022,000   |
| 089                      | Sukowidodo   | 823.603.000   | 10.807.000 | 812,796,000   |
| 090                      | Tanjungsari  | 951.847.000   | 10.807.000 | 941,040,000   |
| 091                      | Gedangan     | 834.570.000   | 10.807.000 | 823,763,000   |
| 092                      | Sukodono     | 824.985.000   | 10.807.000 | 814,178,000   |
| 093                      | Karangrejo   | 754.998.000   | 10.807.000 | 744,191,000   |
| 094                      | Sukorejo     | 776.500.000   | 10.807.000 | 765,693,000   |
| 095                      | Punjul       | 1.183.929.000 | 10.807.000 | 1,173,122,000 |
| 096                      | Jeli         | 842.754.000   | 10.807.000 | 831,947,000   |
| 097                      | Tulungrejo   | 944.105.000   | 10.807.000 | 933,298,000   |
| <b>KEC. GONDANG</b>      |              |               |            |               |
| 098                      | Kendal       | 880.821.000   | 10.807.000 | 870,014,000   |
| 099                      | Tawing       | 829.021.000   | 10.807.000 | 818,214,000   |
| 100                      | Gondosuli    | 773.402.000   | 10.807.000 | 762,595,000   |
| 101                      | Dukuh        | 806.645.000   | 10.807.000 | 795,838,000   |
| 102                      | Sepatan      | 845.579.000   | 10.807.000 | 834,772,000   |
| 103                      | Macanbang    | 899.323.000   | 10.807.000 | 888,516,000   |
| 104                      | Kiping       | 821.530.000   | 10.807.000 | 810,723,000   |
| 105                      | Rejosari     | 847.965.000   | 10.807.000 | 837,158,000   |
| 106                      | Bendo        | 828.536.000   | 10.807.000 | 817,729,000   |
| 107                      | Ngrendeng    | 762.150.000   | 10.807.000 | 751,343,000   |
| 108                      | Gondang      | 744.233.000   | 10.807.000 | 733,426,000   |
| 109                      | Bendungan    | 760.599.000   | 10.807.000 | 749,792,000   |
| 110                      | Notorejo     | 886.681.000   | 10.807.000 | 875,874,000   |
| 111                      | Sidem        | 995.084.000   | 10.807.000 | 984,277,000   |
| 112                      | Sidomulyo    | 902.593.000   | 10.807.000 | 891,786,000   |
| 113                      | Blendis      | 900.514.000   | 10.807.000 | 889,707,000   |
| 114                      | Mojoarum     | 894.095.000   | 10.807.000 | 883,288,000   |
| 115                      | Tiudan       | 1.130.856.000 | 10.807.000 | 1,120,049,000 |
| 116                      | Jarakan      | 769.312.000   | 10.807.000 | 758,505,000   |
| 117                      | Wonokromo    | 824.364.000   | 10.807.000 | 813,557,000   |
| <b>KEC. SUMBERGEMPOL</b> |              |               |            |               |
| 118                      | Sambidoplang | 834.144.000   | 10.807.000 | 823,337,000   |
| 119                      | Wates        | 815.156.000   | 10.807.000 | 804,349,000   |

A



| 1                       | 2                 | 3             | 4          | 5             |
|-------------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| 120                     | Mirigambar        | 945.910.000   | 10.807.000 | 935,103,000   |
| 121                     | Trenceng          | 804.999.000   | 10.807.000 | 794,192,000   |
| 122                     | Bendilwungu       | 788.799.000   | 10.807.000 | 777,992,000   |
| 123                     | Sambijajar        | 834.890.000   | 10.807.000 | 824,083,000   |
| 124                     | Podorejo          | 915.843.000   | 10.807.000 | 905,036,000   |
| 125                     | Doroampel         | 890.158.000   | 10.807.000 | 879,351,000   |
| 126                     | Junjung           | 928.347.000   | 10.807.000 | 917,540,000   |
| 127                     | Tambakrejo        | 835.881.000   | 10.807.000 | 825,074,000   |
| 128                     | Wonorejo          | 939.302.000   | 10.807.000 | 928,495,000   |
| 129                     | Bendiljati Kulon  | 824.122.000   | 10.807.000 | 813,315,000   |
| 130                     | Bendiljati Wetan  | 812.871.000   | 10.807.000 | 802,064,000   |
| 131                     | Sumberdadi        | 881.367.000   | 10.807.000 | 870,560,000   |
| 132                     | Jabalsari         | 1.099.063.000 | 10.807.000 | 1,088,256,000 |
| 133                     | Sambirobyong      | 931.145.000   | 10.807.000 | 920,338,000   |
| 134                     | Bukur             | 838.855.000   | 10.807.000 | 828,048,000   |
| <b>KEC. NGUNUT</b>      |                   |               |            |               |
| 135                     | Karangsono        | 792.653.000   | 10.807.000 | 781,846,000   |
| 136                     | Samir             | 816.788.000   | 10.807.000 | 805,981,000   |
| 137                     | Kacangan          | 819.019.000   | 10.807.000 | 808,212,000   |
| 138                     | Selorejo          | 800.890.000   | 10.807.000 | 790,083,00    |
| 139                     | Balesono          | 831.893.000   | 10.807.000 | 821,086,000   |
| 140                     | Pandansari        | 869.557.000   | 10.807.000 | 858,750,000   |
| 141                     | SumberinginKulon  | 781.704.000   | 10.807.000 | 770,897,000   |
| 142                     | Sumberingin Kidul | 849.934.000   | 10.807.000 | 839,127,000   |
| 143                     | Kaliwungu         | 785.103.000   | 10.807.000 | 774,296,000   |
| 144                     | Sumberejo Wetan   | 835.011.000   | 10.807.000 | 824,204,000   |
| 145                     | Ngunut            | 1.152.746.000 | 10.807.000 | 1,141,939,000 |
| 146                     | Kalangan          | 803.506.000   | 10.807.000 | 792,699,000   |
| 147                     | Gilang            | 870.122.000   | 10.807.000 | 859,315,000   |
| 148                     | Sumberejo Kulon   | 904.918.000   | 10.807.000 | 894,111,000   |
| 149                     | Purworejo         | 927.138.000   | 10.807.000 | 916,331,000   |
| 150                     | Kromasan          | 829.379.000   | 10.807.000 | 818,572,000   |
| 151                     | Pulosari          | 886.000.000   | 10.807.000 | 875,193,000   |
| 152                     | Pulotondo         | 840.487.000   | 10.807.000 | 829,680,000   |
| <b>KEC. PUCANGLABAN</b> |                   |               |            |               |
| 153                     | Pucanglaban       | 1.111.072.000 | 10.807.000 | 1,100,265,000 |
| 154                     | Kalidawe          | 1.061.001.000 | 10.807.000 | 1,050,194,000 |
| 155                     | Panggungkalak     | 960.125.000   | 10.807.000 | 949,318,000   |
| 156                     | Kaligentong       | 847.309.000   | 10.807.000 | 836,502,000   |
| 157                     | Sumberbendo       | 933.019.000   | 10.807.000 | 922,212,000   |
| 158                     | Manding           | 999.233.000   | 10.807.000 | 988,426,000   |
| 159                     | Panggunguni       | 1.089.245.000 | 10.807.000 | 1,078,438,000 |
| 160                     | Sumberdadap       | 952.769.000   | 10.807.000 | 941,962,000   |
| 161                     | Demuk             | 1.193.759.000 | 10.807.000 | 1,182,952,000 |
|                         |                   |               |            |               |

A



| 1                      | 2              | 3             | 4          | 5             |
|------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| <b>KEC. REJOTANGAN</b> |                |               |            |               |
| 162                    | Tenggur        | 972.401.000   | 10.807.000 | 961,594,000   |
| 163                    | Panjerejo      | 841.602.000   | 10.807.000 | 830,795,000   |
| 164                    | Karangsari     | 963.051.000   | 10.807.000 | 952,244,000   |
| 165                    | Tugu           | 943.944.000   | 10.807.000 | 933,137,000   |
| 166                    | Sukorejo Wetan | 1.016.276.000 | 10.807.000 | 1,005,469,000 |
| 167                    | Jatidowo       | 781.761.000   | 10.807.000 | 770,954,000   |
| 8                      | Banjarejo      | 869.986.000   | 10.807.000 | 859,179,000   |
| 169                    | Tanen          | 938.166.000   | 10.807.000 | 927,359,000   |
| 170                    | Sumberagung    | 1.129.481.000 | 10.807.000 | 1,118,674,000 |
| 171                    | Blimbing       | 853.359.000   | 10.807.000 | 842,552,000   |
| 172                    | Rejotangan     | 951.592.000   | 10.807.000 | 940,785,000   |
| 173                    | Pakisrejo      | 813.029.000   | 10.807.000 | 802,222,000   |
| 174                    | Tegalrejo      | 877.485.000   | 10.807.000 | 866,678,000   |
| 175                    | Ariyoteding    | 957.085.000   | 10.807.000 | 946,278,000   |
| 176                    | Tenggong       | 873.999.000   | 10.807.000 | 863,192,000   |
| 177                    | Buntaran       | 873.084.000   | 10.807.000 | 862,277,000   |
| <b>KEC. KALIDAWIR</b>  |                |               |            |               |
| 178                    | Kalibatur      | 1.358.930.000 | 10.807.000 | 1,348,123,000 |
| 179                    | Rejosari       | 1.039.294.000 | 10.807.000 | 1,028,487,000 |
| 180                    | Sukorejo Kulon | 1.033.486.000 | 10.807.000 | 1,022,679,000 |
| 181                    | Kalidawir      | 904.395.000   | 10.807.000 | 893,588,000   |
| 182                    | Karangtalun    | 1.067.980.000 | 10.807.000 | 1,057,173,000 |
| 183                    | Banyu Urip     | 935.640.000   | 10.807.000 | 924,833,000   |
| 184                    | Winong         | 1.003.603.000 | 10.807.000 | 992,796,000   |
| 185                    | Joho           | 1.175.250.000 | 10.807.000 | 1,164,443,000 |
| 186                    | Pakisaji       | 980.301.000   | 10.807.000 | 969,494,000   |
| 187                    | Jabon          | 885.104.000   | 10.807.000 | 874,297,000   |
| 188                    | Tunggangri     | 786.873.000   | 10.807.000 | 776,066,000   |
| 189                    | Salakkembang   | 869.993.000   | 10.807.000 | 859,096,000   |
| 190                    | Ngubalan       | 837.027.000   | 10.807.000 | 826,220,000   |
| 191                    | Domasan        | 944.560.000   | 10.807.000 | 933,753,000   |
| 192                    | Tanjung        | 819.694.000   | 10.807.000 | 808,887,000   |
| 193                    | Betak          | 1.225.038.000 | 10.807.000 | 1,214,231,000 |
| 194                    | Pagersari      | 1.022.897.000 | 10.807.000 | 1,012,090,000 |
| <b>KEC. BESUKI</b>     |                |               |            |               |
| 195                    | Besole         | 1.020.635.000 | 10.807.000 | 1,009,828,000 |
| 196                    | Tanggulwelahan | 839.054.000   | 10.807.000 | 828,247,000   |
| 197                    | Besuki         | 841.808.000   | 10.807.000 | 831,001,000   |
| 198                    | Keboireng      | 887.454.000   | 10.807.000 | 876,647,000   |
| 199                    | Tanggulturus   | 882.637.000   | 10.807.000 | 871,839,000   |
| 200                    | Sedayugunung   | 763.705.000   | 10.807.000 | 752,898,000   |
| 201                    | Tanggulkundung | 845.945.000   | 10.807.000 | 835,138,000   |
| 202                    | Wates Kroyo    | 802.252.000   | 10.807.000 | 791,445,000   |
| 203                    | Siyotobagus    | 953.168.000   | 10.807.000 | 942,361,000   |

A 

| 1                       | 2             | 3             | 4          | 5             |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 204                     | Tulungrejo    | 808.981.000   | 10.807.000 | 798,174,000   |
| <b>KEC. CAMPURDARAT</b> |               |               |            |               |
| 205                     | Ngentrong     | 935.372.000   | 10.807.000 | 974,565,000   |
| 206                     | Gedaugan      | 808.086.000   | 10.807.000 | 797,279,000   |
| 207                     | Sawo          | 877.448.000   | 10.807.000 | 866,641,000   |
| 208                     | Gamping       | 892.565.000   | 10.807.000 | 881,758,000   |
| 209                     | Campurdarat   | 931.077.000   | 10.807.000 | 920,270,000   |
| 210                     | Wates         | 1.329.364.000 | 10.807.000 | 1,318,557,000 |
| 211                     | Pelem         | 1.154.641.000 | 10.807.000 | 1,143,834,000 |
| 212                     | Pojok         | 1.011.886.000 | 10.807.000 | 1,001,079,000 |
| 213                     | Tanggung      | 1.011.373.000 | 10.807.000 | 1,000,566,000 |
| <b>KEC. BANDUNG</b>     |               |               |            |               |
| 214                     | Nglampir      | 865.678.000   | 10.807.000 | 854,871,000   |
| 215                     | Talun Kulon   | 948.430.000   | 10.807.000 | 937,623,000   |
| 216                     | Bantengan     | 873.146.000   | 10.807.000 | 862,339,000   |
| 217                     | Kedungwilt    | 734.129.000   | 10.807.000 | 723,322,000   |
| 218                     | Suwaru        | 803.990.000   | 10.807.000 | 793,183,000   |
| 219                     | Ngunggahan    | 1.193.582.000 | 10.807.000 | 1,182,775,000 |
| 220                     | Suruhan Kidul | 774.448.000   | 10.807.000 | 763,641,000   |
| 221                     | Bandung       | 756.147.000   | 10.807.000 | 746,340,000   |
| 222                     | Mergayu       | 817.823.000   | 10.807.000 | 807,016,000   |
| 223                     | Sebalor       | 836.669.000   | 10.807.000 | 825,862,000   |
| 224                     | Sukoharjo     | 980.605.000   | 10.807.000 | 969,798,000   |
| 225                     | Soko          | 929.468.000   | 10.807.000 | 918,661,000   |
| 226                     | Singgit       | 778.326.000   | 10.807.000 | 767,519,000   |
| 227                     | Ngepeh        | 751.136.000   | 10.807.000 | 740,379,000   |
| 228                     | Suruhan Lor   | 760.701.000   | 10.807.000 | 749,894,000   |
| 229                     | Bulus         | 835.161.000   | 10.807.000 | 824,354,000   |
| 230                     | Kesambi       | 888.510.000   | 10.807.000 | 877,703,000   |
| 231                     | Gandong       | 756.390.000   | 10.807.000 | 745,583,000   |
| <b>KEC. PAKEL</b>       |               |               |            |               |
| 232                     | Sambitan      | 834.361.000   | 10.807.000 | 823,554,000   |
| 233                     | Bono          | 847.638.000   | 10.807.000 | 836,831,000   |
| 234                     | Sukoanyar     | 922.384.000   | 10.807.000 | 911,577,000   |
| 235                     | Duwet         | 832.389.000   | 10.807.000 | 821,582,000   |
| 236                     | Tamban        | 935.082.000   | 10.807.000 | 924,275,000   |
| 237                     | Ngebong       | 798.241.000   | 10.807.000 | 787,434,000   |
| 238                     | Sodo          | 852.510.000   | 10.807.000 | 841,703,000   |
| 239                     | Gombang       | 912.292.000   | 10.807.000 | 901,485,000   |
| 240                     | Pakel         | 768.844.000   | 10.807.000 | 758,037,000   |
| 241                     | Suwaluh       | 873.038.000   | 10.807.000 | 862,231,000   |
| 242                     | Pecuk         | 945.576.000   | 10.807.000 | 934,769,000   |
| 243                     | Bangunmulyo   | 893.762.000   | 10.807.000 | 882,955,000   |
| 244                     | Kasreman      | 808.475.000   | 10.807.000 | 797,668,000   |
| 245                     | Sanan         | 765.524.000   | 10.807.000 | 754,717,000   |

A 



| 1                         | 2              | 3                      | 4                    | 5                      |
|---------------------------|----------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 246                       | Bangunjaya     | 862.853.000            | 10.807.000           | 852,046,000            |
| 247                       | Ngrance        | 851.197.000            | 10.807.000           | 840,390,000            |
| 248                       | Gebang         | 845.297.000            | 10.807.000           | 834,490,000            |
| 249                       | Gesikan        | 1.227.467.000          | 10.807.000           | 1,216,660,000          |
| 250                       | Gempolan       | 837.456.000            | 10.807.000           | 826,549,000            |
| <b>KEC. TANGGUNGUNUNG</b> |                |                        |                      |                        |
| 251                       | Kresikan       | 1.071.986.000          | 10.807.000           | 1,061,179,000          |
| 252                       | Jenglungharjo  | 1.102.656.000          | 10.807.000           | 1,091,849,000          |
| 253                       | Ngrejo         | 988.380.000            | 10.807.000           | 977,573,000            |
| 254                       | Tanggunggunung | 974.087.000            | 10.807.000           | 963,280,000            |
| 255                       | Ngepoh         | 992.122.000            | 10.807.000           | 981,315,000            |
| 256                       | Tenggarejo     | 959.745.000            | 10.807.000           | 948,938,000            |
| 257                       | Pakisrejo      | 1.168.079.000          | 10.807.000           | 1.157.272.000          |
| <b>JUMLAH</b>             |                | <b>237.663.966.000</b> | <b>2.777.399.000</b> | <b>234.886.567.000</b> |

BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

A ✓

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 APRIL 2020

**A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

| LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA<br>TAHAP..... TAHUN ANGGARAN .....<br>PEMERINTAH DESA .....<br>KECAMATAN .....<br>KABUPATEN ..... |                                            |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|--------|------|-----|
| Pagu<br>Desa Rp. ....                                                                                                                                         |                                            |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
| NOMOR                                                                                                                                                         | URAIAN                                     | URAIAN<br>KELUARAN | VOLUME<br>KELUARAN | CARA<br>PENGADAAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA      | % CAPAIAN<br>KELUARAN | TENAGA<br>KERJA | DURASI | UPAH | KET |
|                                                                                                                                                               |                                            |                    |                    |                   | Rp.      | Rp.       | Rp.       |                       | Orang           | Hari   | Rp.  |     |
| 1                                                                                                                                                             | 2                                          | 3                  | 4                  | 5                 | 6        | 7         | 8 = 6 - 7 | 9                     | 10              | 11     | 12   | 13  |
| 1.                                                                                                                                                            | <b>PENDAPATAN</b>                          |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
| 1.2                                                                                                                                                           | <i>Pendapatan Transfer</i>                 |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
| 1.2.1                                                                                                                                                         | <b>Dana Desa</b>                           |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
|                                                                                                                                                               | - TAHAP PERTAMA                            |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
|                                                                                                                                                               | - TAHAP KEDUA                              |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
|                                                                                                                                                               | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                   |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
| 2.                                                                                                                                                            | <b>BELANJA BANTUAN KE DESA A</b>           |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
| 2.1                                                                                                                                                           | <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b> |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
| 2.1.1                                                                                                                                                         | Kegiatan .....                             |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
| 2.1.2                                                                                                                                                         | dst.....                                   |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
| 2.2                                                                                                                                                           | <b>Bidang Pembangunan Desa</b>             |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
| 2.2.1                                                                                                                                                         | Kegiatan .....                             |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
| 2.2.2                                                                                                                                                         | dst.....                                   |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
| 2.3                                                                                                                                                           | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>      |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
| 2.3.1                                                                                                                                                         | Kegiatan .....                             |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |
| 2.3.2                                                                                                                                                         | dst.....                                   |                    |                    |                   |          |           |           |                       |                 |        |      |     |

| NOMOR                | URAIAN                                            | URAIAN KELUARAN | VOLUME KELUARAN | CARA PENGADAAN | ANGGARAN | REALISASI                                          | SISA      | % CAPAIAN KELUARAN | TENAGA KERJA | DURASI | UPAH | KET |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|--------|------|-----|
|                      |                                                   |                 |                 |                | Rp.      | Rp.                                                | Rp.       |                    | Orang        |        |      |     |
| 1                    | 2                                                 | 3               | 4               | 5              | 6        | 7                                                  | 8 = 6 - 7 | 9                  | 10           | 11     | 12   | 13  |
| 2.4                  | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                   |                 |                 |                |          |                                                    |           |                    |              |        |      |     |
| 2.4.1                | Kegiatan .....                                    |                 |                 |                |          |                                                    |           |                    |              |        |      |     |
| 2.4.2                | Dst .....                                         |                 |                 |                |          |                                                    |           |                    |              |        |      |     |
| 2.5                  | Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan             |                 |                 |                |          |                                                    |           |                    |              |        |      |     |
| 2.5.1                | Darurat dan Mendesak                              |                 |                 |                |          |                                                    |           |                    |              |        |      |     |
| 2.5.2                | Kegiatan .....                                    |                 |                 |                |          |                                                    |           |                    |              |        |      |     |
| 3.1.2                | Penyertaan Modal Desa                             |                 |                 |                |          |                                                    |           |                    |              |        |      |     |
|                      | - Modal Awal Pengembangan Usaha                   |                 |                 |                |          |                                                    |           |                    |              |        |      |     |
|                      | - dst.....                                        |                 |                 |                |          |                                                    |           |                    |              |        |      |     |
|                      | <b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>                          |                 |                 |                |          |                                                    |           |                    |              |        |      |     |
|                      | <b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b> |                 |                 |                |          |                                                    | Rp.       |                    |              |        |      |     |
| BENDAHARA DESA ..... |                                                   |                 |                 |                |          | Disetujui oleh,<br>(desa), (tanggal, bulan, tahun) |           |                    |              |        |      |     |
| .....                |                                                   |                 |                 |                |          | KEPALA DESA .....                                  |           |                    |              |        |      |     |
| .....                |                                                   |                 |                 |                |          | .....                                              |           |                    |              |        |      |     |

## PETUNJUK PENGISIAN

### LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

| Nomor | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2     | Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3     | Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4     | Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5     | Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6     | Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7     | Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8     | Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9     | Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:<br>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto<br>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;</li><li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;</li><li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan</li><li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%</li></ul> |
| 10    | Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11    | Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

### LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :  
DESA :  
KECAMATAN :  
TAHUN :

**TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)**

| SASARAN | JUMLAH TOTAL<br>RUMAH TANGGA<br>1.000 HPK | IBU HAMIL |           | ANAK 0-23 BULAN |                                     |
|---------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
|         |                                           | TOTAL     | KEK/RESTI | TOTAL           | GIZI KURANG/<br>GIZI BURUK/STUNTING |
| JUMLAH  |                                           |           |           |                 |                                     |

**TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)**

| SASARAN | JUMLAH TOTAL<br>ANAK USIA 0-23 BULAN | HIJAU<br>(NORMAL) | KUNING<br>(RESIKO STUNTING) | MERAH<br>(TERINDIKASI STUNTING) |
|---------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| JUMLAH  |                                      |                   |                             |                                 |

**TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK**

| SASARAN                                | INDIAKTOR                                                | JUMLAH    |       | % |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------|---|
|                                        |                                                          | LAKI-LAKI | TOTAL |   |
| IBU HAMIL                              | 1 PERIKSA 4 KAU SELAMA KEHAMILAN                         |           |       |   |
|                                        | 2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI             |           |       |   |
|                                        | 3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KAU  |           |       |   |
|                                        | 4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KAU       |           |       |   |
|                                        | 5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN |           |       |   |
|                                        | 6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN   |           |       |   |
|                                        | 7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK           |           |       |   |
|                                        | 8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN                             |           |       |   |
| ANAK USIA<br>0-23 BULAN<br>(0-2 TAHUN) | 1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP   |           |       |   |
|                                        | 2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN               |           |       |   |
|                                        | 3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN       |           |       |   |
|                                        | 4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN    |           |       |   |
|                                        | 5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING  |           |       |   |
|                                        | 6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN |           |       |   |
|                                        | 7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK         |           |       |   |
|                                        | 8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN                          |           |       |   |
|                                        | 9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR                           |           |       |   |
|                                        | 10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) |           |       |   |
| ANAK<br>>2-6 TAHUN                     | 1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%  |           |       |   |

**TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA**

| NO                             | SASARAN         | JUMLAH INDIKATOR |                     | TINGKAT KONVERGENSI |
|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                |                 | YANG DITERIMA    | SEHARUSNYA DITERIMA |                     |
| 1                              | IBU HAMIL       |                  |                     |                     |
| 2                              | ANAK 0-23 BULAN |                  |                     |                     |
| TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA |                 |                  |                     |                     |

**TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING**

| NO | BIDANG/KEGIATAN                | TOTAL<br>ALOKASI DANA | KEGIATAN<br>KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING |            |
|----|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|
|    |                                |                       | ALOKASI DANA                           | % (PERSEN) |
| 1  | BIDANG PEMBANGUNAN DESA        |                       |                                        |            |
| 2  | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                       |                                        |            |

**C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA**

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kab.....(1)

Dengan rincian :

| TAHAP | TANGGAL DITERIMA | JUMLAH | TERBILANG<br>(dengan huruf) |
|-------|------------------|--------|-----------------------------|
| (2)   | (3)              | (4)    | (5)                         |

Dana tersebut telah diterima pada :

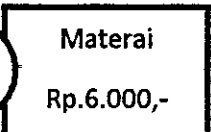
Nomor Rekening : .....(6)

Nama Rekening : .....(7)

Nama Bank : .....(8)

....., tanggal .....(9)

.....(10)



.....(11)

.....(12)

*A*

**PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA  
DI REKENING KAS DESA**

| NOMOR | URAIAN ISIAN                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (1)   | Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa |
| (2)   | Diisi tahapan penyaluran                                                      |
| (3)   | Diisi tanggal dana diterima                                                   |
| (4)   | Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)                                 |
| (5)   | Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)                                 |
| (6)   | Diisi nomor rekening penerima dana                                            |
| (7)   | Diisi nama rekening penerima dana                                             |
| (8)   | Diisi nama bank penerima dana                                                 |
| (9)   | Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat                           |
| (10)  | Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)                                    |
| (11)  | Diisi tanda tangan (Kepala Desa)                                              |
| (12)  | Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)                                       |

UA 

**D. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BLT- DANA DESA**

**LAPORAN PELAKSANAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)  
DESA ..... KEC.....KAB. TULUNGAGUNG**

BULAN : .....

| NO.           | NIK | NAMA KEPALA<br>KELUARGA<br>/YANG<br>MEWAKILI | JUMLAH<br>PENERI<br>MAAN (Rp) | TANGGAL<br>PENERI<br>MAAN | TANDA<br>TANGAN/CAP<br>JEMPOL |
|---------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1             | 2   | 3                                            | 4                             | 5                         | 6                             |
| 1             |     |                                              | 600.000,-                     |                           |                               |
| 2             |     |                                              | 600.000,-                     |                           |                               |
|               |     |                                              |                               |                           |                               |
|               |     |                                              |                               |                           |                               |
| <b>JUMLAH</b> |     |                                              |                               |                           |                               |

....., tgl / bln / 2020

TELAH DIVERIFIKASI OLEH  
SEKRETARIS DESA

YANG MEMBAYAR  
KASI/PKA

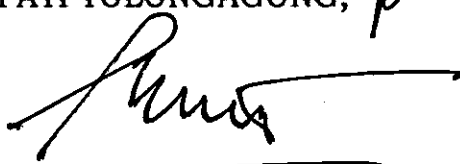
.....

.....

MENGETAHUI  
KEPALA DESA.....

.....

BUPATI TULUNGAGUNG, *P*

  
MARYOTO BOROWO

*H*



MEKANISME PEMBERIAN BLT-DANA DESA

- A. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
1. kehilangan mata pencaharian;
  2. tidak terdata (*exclusion error*); dan
  3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; dan
- B. Mekanisme Pendataan
1. melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
  2. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
  3. kriteria/indikator pendataan sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada huruf A, berdasarkan 14 (empat belas) indikator dari Kementerian Sosial:
    - a. kehilangan mata pencaharian dan sakit kronis, untuk menentukan keluarga kategori miskin, jumlah minimal 1 (satu) indikator terpenuhi di dalam 14 (empat belas) indikator dari Kementerian Sosial, penentuan minimal kriteria dilakukan dengan Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa; dan
    - b. tidak terdata pada DTKS (*exclusion error*), keluarga miskin tidak terdata pada PKH, BPNT namun memenuhi 9 (sembilan) indikator, pendataan BLT-Dana Desa tetap menggunakan 14 (empat belas) indikator dari Kementerian Sosial (jika memenuhi 9 indikator maka tergolong rumah tangga miskin).
  4. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data, ditindak lanjuti dengan Berita Acara.
  5. Dokumen dilaporkan ke Kecamatan untuk disahkan oleh Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima, selanjutnya Kepala Desa menindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa.
  6. Legalitas dokumen penetapan dan penyaluran merupakan tanggung jawab Kepala Desa;
- C. Metode dan Mekanisme Penyaluran
1. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
    - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
    - b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
    - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

R



- d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.
  2. penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- D. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
1. masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
  2. besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- E. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
1. Badan Permusyawaratan Desa;
  2. Camat; dan
  3. Inspektorat Kabupaten.
- F. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- G. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

